

Latihan Ulangan Semester

I. Berilah tanda silang (x) huruf a, b, c, d, atau e pada jawaban yang paling benar!

1. Penyelenggaraan negara dalam arti sempit, yaitu
 - a. eksekutif
 - b. legislatif
 - c. yudikatif
 - d. konstitutif
 - e. eksaminatif
2. Kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter merupakan kekuasaan
 - a. konstitutif
 - b. eksekutif
 - c. legislatif
 - d. yudikatif
 - e. moneter
3. Menurut pandangan John Locke, pemerintahan pada suatu negara harus dipisah-pisahkan menjadi beberapa bidang kekuasaan, yaitu
 - a. legislatif, eksekutif, dan yudikatif
 - b. eksekutif dan yudikatif
 - c. legislatif dan eksekutif
 - d. legislatif, eksekutif, dan federatif
 - e. legislatif dan federatif
4. Pemegang kekuasaan yudikatif terdiri atas
 - a. MA, MK, dan KY
 - b. DPR, MPR, dan DPD
 - c. DPR dan BPK
 - d. BPK, KY, dan presiden
 - e. DPD, MPR, dan presiden
5. Lembaga negara yang dihapus setelah adanya perubahan UUD 1945 adalah
 - a. Dewan Pertimbangan Agung
 - b. Mahkamah Agung
 - c. Mahkamah Konstitusi
 - d. Dewan Perwakilan Rakyat
 - e. Badan Pemeriksa Keuangan
6. Badan Pemeriksa Keuangan bertanggung jawab atas pengelolaan dan tanggung jawab atas keuangan negara sehingga memiliki kekuasaan
 - a. eksaminatif
 - b. moneter
 - c. yudikatif
 - d. legislatif
 - e. federatif
7. Pancasila harus menjadi landasan utama untuk mencapai cita-cita, tujuan bernegara, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan makna Pancasila dalam dimensi
 - a. idiil
 - b. konstitusional
 - c. institusional
 - d. kultural
 - e. spiritual
8. Asas kewarganegaraan seseorang yang ditentukan berdasarkan tempat ia dilahirkan tanpa mengindahkan kewarganegaraan orang tuanya disebut asas
 - a. repudiasi
 - b. ganda
 - c. tunggal
 - d. *ius sanguinis*
 - e. *ius soli*
9. Pemerolehan kewarganegaraan seseorang bukan karena pemberlakuan asas *ius sanguinis* dan *ius soli* dinamakan
 - a. proses hukum warga negara
 - b. pewarganegaraan
 - c. pernyataan menjadi warga negara
 - d. pengajuan warga negara
 - e. permohonan warga negara
10. Seorang warga negara Tiongkok yang menganut asas *ius sanguinis* memiliki anak di Amerika Serikat yang menganut asas *ius soli*, maka status kewarganegaraan anak itu adalah
 - a. apatride
 - b. memperoleh satu kewarganegaraan
 - c. memperoleh dengan permohonan
 - d. bipatride
 - e. pengajuan warga negara
11. Untuk mendapatkan kewarganegaraan melalui naturalisasi, suatu permohonan yang diajukan secara tertulis dan bermeterai lengkap ditujukan kepada
 - a. Kedutaan Besar RI
 - b. Presiden
 - c. Menteri Luar Negeri
 - d. Menteri Dalam Negeri
 - e. Menteri Kehakiman

12. Berikut ini yang **tidak** termasuk hak warga negara Indonesia adalah
- berhak mendapatkan perlindungan hukum
 - berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
 - memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan
 - bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai
 - berhak melakukan pembelaan terhadap negara Indonesia
13. Hak untuk menolak suatu kewarganegaraan disebut dengan hak
- amnesti
 - opsi
 - repudiiasi
 - ekstirpasi
 - refusiasi
14. Undang-undang kewarganegaraan pertama kali yang dipakai Indonesia adalah
- UU No. 3 Tahun 1946
 - UU No. 62 Tahun 1958
 - UU No. 7 Tahun 1984
 - UU No. 6 Tahun 2001
 - UU No. 12 Tahun 2006
15. Berikut ini asas-asas yang digunakan dalam penyusunan UU No. 12 Tahun 2006, **kecuali** asas
- ius soli*
 - ius sanguinis*
 - kewarganegaraan tunggal
 - kewarganegaraan ganda terbatas
 - apatride
16. Berikut ini yang **tidak** termasuk usaha untuk menciptakan kerukunan di antara umat beragama adalah
- toleransi antar umat beragama
 - kemerdekaan beragama dilaksanakan dengan adil dan benar
 - menumbuhkan kerukunan dalam pergaulan
 - menumbuhkan saling pengertian dalam pergaulan
 - pembiaran atas penodaan terhadap agama tertentu
17. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memerhatikan pertimbangan dari
- presiden
 - DPR
 - DPD
 - MA
 - MK
18. Salah satu tugas presiden sebagai kepala negara adalah memegang kekuasaan AD, AL, dan AU yang diatur dalam Pasal ... UUD 45.
- 7
 - 8
 - 9
 - 10
 - 11
19. Presiden harus bekerja sama dengan DPR dalam hal
- membuat undang-undang
 - membuat gelar, tanda jasa, dan tanda-tanda kehormatan lainnya
 - membuat peraturan pemerintah
 - menjalankan pemerintahan
 - memilih anggota DPD
20. Menguji semua peraturan perundangan yang ada di bawah undang-undang adalah wewenang dari
- presiden
 - DPR
 - DPD
 - MK
 - MA
21. Jumlah anggota DPR berdasarkan Pasal 21 UU No. 10 Tahun 2008 ditentukan sebanyak ... orang.
- 560
 - 550
 - 540
 - 530
 - 575
22. Jumlah anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak ... orang.
- 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
23. Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden adalah kewajiban dari
- MA
 - KY
 - DPD
 - BPK
 - MK
24. Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat sendiri disebut
- otonomi daerah
 - kewenangan daerah
 - daerah khusus
 - daerah otonom
 - gemeinschaft*

25. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 di antara kewenangan pemerintah pusat yang tidak diotonomikan adalah
 - a. pendidikan
 - b. agama
 - c. sosial
 - d. pertahanan
 - e. kesehatan
26. Berikut termasuk empat daerah istimewa di Indonesia, **kecuali**
 - a. Daerah Khusus Ibu kota Jakarta
 - b. Provinsi Papua
 - c. Provinsi Aceh
 - d. Provinsi Kalimantan Utara
 - e. Daerah Istimewa Yogyakarta
27. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diatur secara konstitusional dalam UUD 1945 Pasal
 - a. 17
 - b. 18
 - c. 19
 - d. 20
 - e. 21
28. Undang-undang yang mengatur Pemerintah Daerah adalah UU Nomor ... Tahun 2004.
 - a. 31
 - b. 32
 - c. 33
 - d. 34
 - e. 35
29. Asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu disebut asas
 - a. desentralisasi
 - b. sentralisasi
 - c. dekonsentrasi
 - d. perbantuan
 - e. good governance
30. Sekretaris daerah mempunyai tugas untuk
 - a. menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD
 - b. mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah
 - c. melakukan hak interpelasi
 - d. menghitung keuangan daerah
 - e. melantik kepala daerah

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Sebutkan salah satu contoh asas bipartide!
2. Apa makna warga negara dan bukan warga negara?
3. Apa tugas Badan Pemeriksa Keuangan?
4. Bagaimanakah pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia?
5. Jelaskan hubungan antara otonomi daerah dan pembangunan daerah!

Soal Remidi

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Tuliskan bunyi Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 tentang bela negara!
2. Sebutkan bidang-bidang yang ditangani Komisi I, II, III DPR!
3. Berikan salah satu contoh asas kewarganegaraan *ius soli*!
4. Apa tujuan dari adanya partisipasi politik?
5. Apa pengertian daerah otonom?

Soal Pengayaan

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Jelaskan yang dimaksud teori pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan!
2. Sebutkan tugas dan wewenang Mahkamah Agung!
3. Jelaskan yang dimaksud naturalisasi istimewa!
4. Apa yang dimaksud dengan zona laut teritorial dan zona landas kontinen?
5. Sebutkan bentuk-bentuk partisipasi politik konvensional dan nonkonvensional!
6. Apa perbedaan korupsi, kolusi, dan nepotisme? Jelaskan!
7. Bagaimana mekanisme penetapan calon pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah?
8. Mengapa pemilu merupakan wujud kekuasaan rakyat yang paling nyata?
9. Sebutkan ciri-ciri sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta!
10. Sebutkan hak yang dimiliki daerah dalam menyelenggarakan otonomi berdasarkan Pasal 21 UU Nomor 32 Tahun 2004!